

BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 27 TAHUN 2026

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PROGRAM UNGGULAN
PADA UNIT PELAYANAN KESEHATAN DESA DAN POS PELAYANAN TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sebagai bagian dari tujuan pembangunan daerah serta pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan pelayanan kesehatan yang memadai melalui pemenuhan bangunan, presarana, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan lainnya di Desa;

b. bahwa kondisi ketersediaan dan kualitas bangunan, prasarana, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan lainnya di desa masih memerlukan peningkatan guna memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat yang merata, terjangkau, dan berkualitas, sehingga diperlukan dukungan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa, belanja bantuan keuangan bersifat khusus untuk program unggulan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan pengelolaan sepenuhnya diserahkan kepada Pemerintah Desa sebagai penerima bantuan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Khusus Program Unggulan pada Unit Pelayanan Kesehatan Desa dan Pos Pelayanan Terpadu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang

Perubahan Batas Wilajah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaja dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 266);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaan Perizinan Barusaha Berbasis Risiko Subsektor Kesehatan (Berita Negara Tahun 2025 Nomor 749);
15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 14);
17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PROGRAM UNGGULAN PADA UNIT PELAYANAN KESEHATAN DESA DAN POS PELAYANAN TERPADU.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
6. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya.
8. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
9. Bantuan Keuangan Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah bantuan keuangan yang peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan Pengelolaannya sepenuhnya diserahkan kepada Pemerintah Desa sebagai penerima bantuan.
10. Unit Pelayanan Kesehatan Desa yang selanjutnya disingkat UPKD adalah jaringan atau jejaring Puskesmas pada tingkat Desa yang melakukan pelayanan kesehatan primer dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam urusan kesehatan.
11. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah bagian dari lembaga kemasyarakatan Desa sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan kesehatan serta peningkatan pelayanan kesehatan di Desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman peruntukan, penyaluran, penatausahaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi terhadap BKK Program Unggulan pada UPKD dan Posyandu.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkdan dengan tujuan:

a. memenuhi standar dalam pemberian BKK Program Unggulan pada UPKD dan Posyandu;
b. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar;
c. mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pelayanan kesehatan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan meliputi :

a. sasaran penerima BKK;
b. Peruntukkan BKK
c. Identifikasi kebutuhan, verifikasi, dan pendampingan teknis;
d. mekanisme penyaluran, penatausahaan, dan dukungan operasional; dan
e. pelaporan, monitoring dan evaluasi.

BAB III
SASARAN PENERIMA BKK

Pasal 5

(1) Penerima BKK Program Unggulan pada UPKD dan Posyandu merupakan Desa yang memiliki UPKD dan/atau Posyandu yang aktif beroperasional.
(2) Daftar penerima dan besaran BKK Progam Unggulan pada UPKD dan Posyandu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PERUNTUKAN BKK

Pasal 6

(1) BKK Program Unggulan pada UPKD dan Posyandu digunakan untuk pemenuhan:
    a. rehabilitasi ringan ruang UPKD dan/atau Posyandu;
    b. alat kesehatan sederhana;
    c. perbekalan kesehatan lainnya meliputi:
        1. perbekalan kesehan rumah tangga;
        2. bahan medis habis pakai;
        3. perlengkapan penunjang pelayanan kesehatan;
        4. media promosi kesehatan
        5. formulir,
        6. instrumen skrining;
        7. buku cetak; dan/atau
    d. honorarium tim pelaksana kegiatan.
(2) Rehabilitasi ringan ruang UPKD dan/atau Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan terhadap ruang atau bangunan dengan status hak yang jelas dan tidak dalam sengketa.
(3) Dalam hal rehabilitasi ringan dilakukan pada bangunan milik Desa atau bangunan yang digunakan secara sah untuk pelayanan kesehatan pada UPKD dan/atau Posyandu, status aset mengikuti ketentuan mengenai pengelolaan barang milik Daerah dan pengelolaan barang milik Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Alat kesehatan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan barang medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a. memiliki izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. mencantumkan nama produk, merek, tipe/model, dan identitas produsen atau penyalur;
   c. dilengkapi label, kemasan, petunjuk penggunaan, atau informasi lain yang dapat ditelusuri; dan
   d. dalam kondisi baru, laik pakai, tidak rusak dan tidak kadaluarsa.
(5) Rincian peruntukan BKK Program Unggulan pada UPKD dan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1) Dalam rangka pemenuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), pengadaan barang/jasa di Desa wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa dan memperhatikan legalitas barang dan penyedia.
(2) Penyedia barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a. memiliki nomor izin berusaha yang masih berlaku;
   b. memiliki kegiatan usaha yang sesuai dengan barang yang diperdagangkan;
   c. mampu menunjukkan identitas, spesifikasi, dan dokumen barang yang ditawarkan; dan
   d. bersedia memberikan dokumen pembelian, garansi, manual penggunaan, dan/atau dokumen pendukung lainnya.

BAB V
IDENTIFIKASI KEBUTUHAN, VERIFIKASI,
DAN PENDAMPINGAN TEKNIS

Pasal 8

(1) Sebelum pengadaan dilakukan, Pemerintah Desa wajib menyusun identifikasi kebutuhan pengadaan barang berdasarkan kondisi pelayanan kesehatan di tingkat Desa.
(2) Identifikasi kebutuhan pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
   a. Identifikasi kebutuhan barang; dan
   b. Identifikasi barang sejenis yang telah tersedia / dimiliki/ dikuasai;
(3) Identifikasi kebutuhan pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan:
   a. tenaga kesehatan pada UPKD dan/atau Posyandu; dan
   b. Puskesmas di wilayah setempat.

(4) Format identifikasi kebutuhan pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(5) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk:
   a. menjamin pelayanan kesehatan pada UKPD dan/atau Posyandu penerima BKK Program Unggulan pada UPKD dan Posyandu aktif beroperasional;
   b. menjamin kesesuaian barang dengan standar pelayanan;
   c. mencegah pengadaan barang yang tidak dapat dimanfaatkan;
   d. menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan BKK Program Unggulan; dan
   e. memastikan kesinambungan pelayanan kesehatan.
(6) Hasil identifikasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi secara berjenjang oleh:
   a. tenaga kesehatan atau penanggung jawab pelayanan kesehatan tingkat Desa;
   b. penanggung jawab koordinasi jejaring Puskesmas; dan
   c. Kepala Puskesmas di wilayah setempat.
(7) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka (4) meliputi pemeriksaan terhadap:
   a. kesesuaian jenis barang dengan kebutuhan pelayanan kesehatan;
   b. kesesuaian spesifikasi teknis barang;
   c. jumlah kebutuhan barang;
   d. kesesuaian dengan standar pelayanan kesehatan;
   e. ketersediaan kelengkapan pendukung untuk pemanfaatan barang; dan
   f. prioritas kebutuhan pelayanan kesehatan di Desa.

## BAB VI
## MEKANISME PENYALURAN, PENATAUSAHAAN DAN DUKUNGAN OPERASIONAL

### Bagian Kesatu
### Penyaluran

#### Pasal 9
(1) BKK disalurkan dari APBD Kabupaten Sidoarjo kepada Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) BKK yang bersumber dari APBD diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa untuk dikelola oleh PPKD sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan desa.

### Bagian Kedua
### Penatausahaan dan Dukungan Operasional

#### Pasal 10
(1) Barang yang diperoleh dari BKK Program Unggulan kepada UPKD dan Posyandu menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa dan dicatat sesuai ketentuan pengelolaan barang milik Desa atau barang milik Daerah.

(2) Pemerintah Desa wajib menyediakan dukungan operasional minimum agar barang yang diadakan dapat dimanfaatkan secara optimal pada UPKD dan/atau Posyandu.
(3) Dukungan operasional minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. tempat penyimpanan yang aman;
b. kebersihan dan perlindungan barang;
c. petunjuk penggunaan;
d. jadwal pemeliharaan; dan
e. penganggaran pemeliharaan dan/atau kalibrasi sesuai kemampuan keuangan desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan
f. penggantian komponen atau BMHP penunjang yang diperlukan untuk keberlanjutan pemanfaatan.
(4) Pemerintah Desa bertanggung jawab atas penggunaan barang sesuai peruntukan dan keberlanjutan manfaat penggunaan barang.
(5) Dalam hal alat kesehatan tidak laik pakai, Pemerintah Desa wajib menghentikan penggunaan dan berkoordinasi dengan Puskesmas wilayah setempat.

## BAB VII
## PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 11

(1) Laporan Pertanggungjawaban BKK Program Unggulan pada UPKD dan Posyandu mengacu pada pedoman pengelolaan keuangan Desa sesuai peraturan perundang-undangan dan menjadi satu kesatuan dalam Laporan Pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja Desa.
(2) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 12

(1) Puskesmas melakukan monitoring secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali terhadap pelaksanaan BKK Program Unggulan pada UKPD dan Posyandu diwilayah kerjanya.
(2) Hasil monitoring Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pembinaan dan evaluasi pemanfaatan BKK Program Unggulan pada UPKD dan Posyandu.
(3) Format pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 13 Juli 2026

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SUBANDI

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 13 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

FENNY APRIDAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2026 NOMOR 27

NOREG PERBUP : 27 TAHUN 2026

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 27 TAHUN 2026 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS UNTUK PEMENUHAN BANGUNAN, PRASARANA, ALAT KESEHATAN, DAN PERBEKALAN KESEHATAN LAINNYA DI UNIT PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT DESA DAN POS PELAYANAN TERPADU TAHUN ANGGARAN 2026

A. Matriks Jenis Barang yang Dapat Dibiayai

| No | Jenis Barang | Kategori | Dapat Dibeli dengan BKK Desa | Dapat Digunakan di UPKD | Dapat Digunakan pada Posyandu | Memerlukan Kalibrasi Berkala | Memerlukan Tenaga Kesehatan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tensimeter digital | Alat kesehatan | Ya | Ya | Ya | Ya | Tidak | Untuk pemeriksaan tekanan darah dasar |
| 2 | Manset tensimeter anak/dewasa/bayi | Aksesori alat kesehatan | Ya | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Menyesuaikan alat dan kelompok sasaran |
| 3 | Termometer digital | Alat kesehatan | Ya | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Wajib uji fungsi dan pemeliharaan berkala |
| 4 | *Acute Respiratory Infections (ARI) timer* | Perbekalan kesehatan lainnya | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Untuk deteksi dini gangguan pernapasan |
| 5 | Timbangan badan digital | alat kesehatan | Ya | Ya | Ya | Ya | Tidak | Untuk pemantauan status gizi |
| 6 | Timbangan bayi digital | Alat kesehatan | Ya | Ya | Ya | Ya | Tidak | Untuk pelayanan ibu dan bayi |
| 7 | Alat ukur panjang badan | Perbekalan kesehatan lainnya | Ya | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Untuk antropometri bayi/balita |
| 8 | Alat ukur tinggi badan | Perbekalan kesehatan lainnya | Ya | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Untuk antropometri anak/dewasa |
| 9 | Meteran | Perbekalan kesehatan lainnya | Ya | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Untuk pengukuran dasar |
| 10 | Pita pengukur LiLA | Perbekalan kesehatan lainnya | Ya | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Untuk skrining gizi |

| No | Jenis Barang | Kategori | Dapat Dibeli dengan BKK Desa | Dapat Digunakan di UPKD | Dapat Digunakan pada Posyandu | Memerlukan Kalibrasi Berkala | Memerlukan Tenaga Kesehatan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Alat pemeriksaan Hb portable | Alat kesehatan | Ya | Ya | Ya, terbatas | Ya | Ya | Penggunaan dengan pendampingan Puskesmas |
| 12 | Strip Hb | BMHP | Ya | Ya | Ya, terbatas | Tidak | Ya | Menyesuaikan alat yang digunakan |
| 13 | Alat tes gula darah portable | Alat kesehatan | Ya | Ya | Ya, terbatas | Ya | Ya | Penggunaan dengan pendampingan |
| 14 | Strip gula darah | BMHP | Ya | Ya | Ya, terbatas | Tidak | Ya | Perhatikan masa kedaluwarsa |
| 15 | Alat tes asam urat portable | Alat kesehatan | Ya | Ya | Ya, terbatas | Ya | Ya | Penggunaan dengan pendampingan |
| 16 | Strip asam urat | BMHP | Ya | Ya | Ya, terbatas | Tidak | Ya | Perhatikan penyimpanan |
| 17 | Alat tes kolesterol portable | Alat kesehatan | Ya | Ya | Ya, terbatas | Ya | Ya | Penggunaan dengan pendampingan |
| 18 | Strip kolesterol | BMHP | Ya | Ya | Ya, terbatas | Tidak | Ya | Perhatikan penyimpanan |
| 19 | Tes celup hCG | bahan medis habis pakai | Ya | Ya | Ya, terbatas | Tidak | Ya | Digunakan sesuai petunjuk dan pendampingan |
| 20 | Tempat tidur periksa | Furnitur | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Untuk ruang pelayanan |
| 21 | Lemari alat | Furnitur | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Untuk penyimpanan alat |
| 22 | Lemari obat/reagen | Furnitur | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak untuk penyimpanan obat program di luar ketentuan |
| 23 | Lemari pendingin penyimpan reagen atau obat | Perlengkapan | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Digunakan sesuai kebutuhan layanan |
| 24 | Meja pelayanan | Furnitur | Ya | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Untuk meja pemeriksaan/administrasi |
| 25 | Kursi | Furnitur | Ya | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Untuk pelayanan dan tunggu |
| 26 | Bantal | Perlengkapan | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Pelengkap tempat tidur periksa |
| 27 | Lampu periksa dengan baterai | Perlengkapan | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Penunjang pemeriksaan dasar |
| 28 | Alat deteksi dini perkembangan/SDIDTK | Perlengkapan | Ya | Ya | Ya | Tidak | Ya | Penggunaan dengan pendampingan tenaga kesehatan |

| No | Jenis Barang | Kategori | Dapat Dibeli dengan BKK Desa | Dapat Digunakan di UPKD | Dapat Digunakan pada Posyandu | Memerlukan Kalibrasi Berkala | Memerlukan Tenaga Kesehatan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Plester dengan pad | BMHP | Ya | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Untuk pertolongan dasar |
| 30 | Plester perekat non pad | BMHP | Ya | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Untuk penanganan sederhana |
| 31 | Kapas/Kapas serap medis | BMHP | Ya | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Untuk kebutuhan tindakan sederhana |
| 32 | Kasa | BMHP | Ya | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Untuk kebutuhan tindakan sederhana |
| 33 | Kasa hidrofil steril | BMHP | Ya | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Untuk kebutuhan tindakan sederhana |
| 34 | Apron/Celemek | BMHP/perlengkapan | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | APD dasar |
| 35 | Goggle/Medical goggles | BMHP/perlengkapan | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | APD dasar |
| 36 | Masker medis/masker bedah | BMHP | Ya | Ya | Ya | Tidak | Tidak | APD dasar |
| 37 | Sarung tangan non steril | BMHP | Ya | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Digunakan sesuai kebutuhan |
| 38 | Sarung tangan steril | BMHP | Ya | Ya | Ya, terbatas | Tidak | Ya | Untuk tindakan tertentu oleh petugas berwenang |
| 39 | Lidi kapas steril | BMHP | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Untuk tindakan sederhana |
| 40 | Perlak penyerap | BMHP/perlengkapan | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Untuk pemeriksaan sederhana |
| 41 | Sabun tangan/antiseptik | BMHP | Ya | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Kebersihan tangan |
| 42 | Sikat tangan | BMHP/perlengkapan | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Penunjang kebersihan |
| 43 | Sikat pembersih alat | BMHP/perlengkapan | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Pemeliharaan alat |
| 44 | Kapas alkohol | BMHP | Ya | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Kebutuhan tindakan sederhana |
| 45 | Cairan desinfektan/Povidone Iodine | BMHP | Ya | Ya | Ya, terbatas | Tidak | Ya | Digunakan sesuai indikasi |
| 46 | Tempat sampah tertutup dengan injakan | Perlengkapan | Ya | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Pengelolaan sampah dasar |
| 47 | Pot spesimen dahak mulut lebar | BMHP/perlengkapan | Ya | Ya | Ya, terbatas | Tidak | Ya | Untuk skrining tertentu sesuai arahan Puskesmas |
| 48 | Safety box | BMHP/perlengkapan | Ya | Ya | Ya | Tidak | Ya | Wajib bila terdapat limbah tajam |

| No | Jenis Barang | Kategori | Dapat Dibeli dengan BKK Desa | Dapat Digunakan di UPKD | Dapat Digunakan pada Posyandu | Memerlukan Kalibrasi Berkala | Memerlukan Tenaga Kesehatan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Form pelayanan Posyandu | Media/Formulir | Ya | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Dapat berupa cetak |
| 50 | Ceklis kunjungan rumah | Media/Formulir | Ya | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Untuk pencatatan pelayanan |
| 51 | Buku KIA | Media/Formulir | Ya, sesuai ketentuan | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Menyesuaikan ketentuan program |
| 52 | Buku saku monitoring FR PTM | Media/Formulir | Ya | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Media pencatatan/edukasi |
| 53 | Form skrining layak hamil bagi PUS | Media/Formulir | Ya | Ya | Ya | Tidak | Ya | Penggunaan dengan pendampingan |
| 54 | Form skrining TBC | Media/Formulir | Ya | Ya | Ya | Tidak | Ya | Sesuai arahan Puskesmas |
| 55 | Instrumen P3G | Media/Formulir | Ya | Ya | Ya | Tidak | Ya | Sesuai layanan lansia |
| 56 | Instrumen kesehatan jiwa/SRQ-20 | Media/Formulir | Ya | Ya | Ya | Tidak | Ya | Dengan pendampingan |
| 57 | Kartu/Form deteksi dini kanker | Media/Formulir | Ya | Ya | Ya | Tidak | Ya | Untuk skrining awal/edukasi |
| 58 | Kuesioner PUMA | Media/Formulir | Ya | Ya | Ya | Tidak | Ya | Untuk skrining faktor risiko |
| 59 | Lembar balik/standing banner/poster | Media promosi | Ya | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Untuk KIE |
| 60 | APE SDIDTK | Media/Perlengkapan | Ya | Ya | Ya | Tidak | Ya | Untuk stimulasi, deteksi, intervensi dini |
| 61 | Meja administrasi | Furnitur | Ya | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Penunjang pencatatan dan pelayanan |
| 62 | Kursi tunggu | Furnitur | Ya | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Penunjang kenyamanan layanan |
| 63 | Kursi roda | Perlengkapan | Ya | Ya | Ya, terbatas | Tidak | Tidak | Untuk mobilisasi sasaran di lokasi layanan |
| 64 | Lemari arsip/formulir | Furnitur | Ya | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Penyimpanan dokumen dan media |
| 65 | Alat tulis dan map untuk skrining/formulir | Perlengkapan pendukung | Ya | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Sepanjang melekat langsung pada pelaksanaan layanan |

B. Format Penyusunan Identifikasi Kebutuhan Pengadaan Barang, Laporan, serta Monitoring dan Evaluasi

1. Format Identifikasi Kebutuhan Pengadaan Barang

**FORMULIR IDENTIFIKASI KEBUTUHAN BARANG TAHUN .....**

| | | |
|---|---|---|
| PERANGKAT DAERAH | : | ..... |
| PROGRAM | : | ..... |
| KEGIATAN | : | ..... |
| SUB KEGIATAN | : | ..... |
| JENIS KEBUTUHAN | : | ..... |
| PENANGGUNG JAWAB | : | ..... |
| PUSKESMAS PEMBINA | : | ..... |
| JENIS LAYANAN | : | (UPKD / Posyandu) |
| STATUS KEAKTIFAN LAYANAN | : | (Aktif / Tidak Aktif) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **A** | **IDENTIFIKASI KEBUTUHAN BARANG** | | | |
| 1 | Nama / Jenis Barang | ..... | | |
| 2 | Fungsi / Kegunaan | ..... | | |
| 3 | Spesifikasi / Ukuran / Kapasitas | ..... | | |
| 4 | Jumlah Barang Yang Diperlukan | ..... | | |
| 5 | Waktu Pemanfaatan Barang | ..... | | |
| 6 | Terdapat di e-Katalog / E-Pruchasing | Ya / Tidak | | |
| 7 | Tingkat Prioritas Kebutuhan Barang | Tinggi / Sedang / Kecil | | |
| 8 | Perkiraan Harga Barang | Rp. | | |
| 9 | Kemudahan Memperoleh Barang di pasaran Sesuai dengan Jumlah yang dibutuhkan | Ya / Tidak | | |
| 10 | Kemudahan memperoleh barang di pasaran Indonesia sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan | Ya / Tidak | | |
| 11 | Kriteria Barang | (dapat dicentang lebih dari satu)<br>☐ Sesuai Standar Pelayanan<br>☐ Tidak memerlukan Tindakan invasif<br>☐ Risiko rendah<br>☐ Dapat digunakan di desa<br>☐ Tidak termasuk yang dilarang | | |
| 12 | Persyaratan Barang Memiliki nilai TKDN tertentu | Ya / Tidak<br>Paling sedikit TKDN : 40% | | |
| **B** | **IDENTIFIKASI BARANG SEJENIS YANG TELAH TERSEDIA/ DIMILIKI/ DIKUASAI** | | | |
| 13 | Jenis barang sejenis yang telah tersedia / dimiliki / dikuasai | ..... | | |
| 14 | kondisi/ kelayakan barang | Layak pakai | : | ..... |
| | | Rusak/dalam perbaikan | : | ..... |
| | | Tidak dapat digunakan | : | ..... |
| | | lainnya | : | ..... |
| 15 | Lokasi Keberadaan Barang | ..... | | |
| 16 | Jadwal Pemeliharaan | Ada / Tidak | | |

| | | |
|---|---|---|
| 17 | Rencana Kalibrasi | Ada / Tidak |
| 18 | Sumber biaya Pemeliharaan dan Kalibrasi | ..... |
| 19 | Estimasi Masa Manfaat | ..... |
| TTD Penanggung Jawab Layanan | | Sidoarjo, tanggal_surat<br>TTD Kepala Desa |

| Verifikasi Berjenjang | | | |
|---|---|---|---|
| Level | Nama | Tanggal | TTD |
| Nakes Desa | | | |
| PJ Jejaring Puskesmas | | | |
| Kepala Puskesmas | | | |

2. Format Pelaporan BKK

Kop Surat Desa

1. Identitas Laporan
   Nama Desa :
   Tahun :
   Puskesmas :
   Tanggal Laporan :
2. Ringkasan Pelaksanaan
   Total anggaran :
   Jumlah item :
   Waktu pelaksanaan :
3. Daftar Barang yang Diadakan

| No | Nama dan merk Barang | Spesifikasi | Jumlah | Harga | Penyedia | Legalitas (NIB/NIE) | Tanggal serah terima | Nomor dokumen serah terima | Kondisi barang saat ini | Jadwal Pemeliharaan /kalibrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |

4. Kendala
5. Tindak Lanjut

Ditandatangani oleh:
Kepala Desa

Tembusan:
- Puskesmas
- Dinas Kesehatan

3. Format Monitoring & Evaluasi

KOP Surat Puskesmas

1. Identitas Monitoring
   Nama Desa :
   Tanggal Monitoring :
   Petugas :

2. Ceklist Monitoring dan Evaluasi

| No | Aspek | Ya | Tidak | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sesuai kebutuhan dan perencanaan | | | |
| 2 | Pengadaan Sesuai standar:<br>a. Spesifikasi<br>b. Legalitas<br>c. Harga | | | |
| 3 | Pemanfaatan | | | |
| 4 | Pemeliharaan / Kalibrasi | | | |
| 5 | Kondisi barang saat ini | | | |
| 6 | Pelaporan | | | |

7. Kesimpulan
8. Rekomendasi

Kepala Puskesmas

Nama
NIP

Petugas Monitoring

Nama
NIP

C. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
Adalah satuan biaya maksimal yang diberikan kepada Tim Pelaksana kegiatan berdasarkan Keputusan Kepala Desa. Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.

Tabel Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

| No. | URAIAN | PAKET (Rp) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 5 jt s/d 10 jt | Di atas 10 s/d 50 jt | Di atas 50 s/d 200 jt | Di atas 200 jt |
| 1 | Ketua (O/K) | 100.000 | 300.000 | 350.000 | 400.000 |
| 2 | Sekretaris (O/K) | 75.000 | 250.000 | 300.000 | 350.000 |
| 3 | Anggota | 50.000 | 200.000 | 250.000 | 300.000 |

.

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SUBANDI